KEKUATAN LAUT AS DI YOKOSUKA JEPANG DALAM MENGHADAPI KEKUATAN LAUT TIONGKOK DI CHINA'S NEAR-SEAS REGION (2013-2017)

THE US MARITIME POWER IN YOKOSUKA JAPAN FACING CHINA'S MARITIME POWER IN THE CHINA'S NEAR-SEAS REGION (2013-2017)

Muhammad Fauzan Malufti¹⁾, Arfin Sudirman*)

- 1)Department of International Relations, Universitas Padjadjaran, Bandung
- *) Department of International Relations, Universitas Padjadjaran, Bandung arfin.sudirman@unpad.ac.id

ABSTRACT

This article aims to describe the function of the US sea power in Yokosuka Japan against Chinese sea power in China's Near-seas Region in 2013-2017. In the past two decades, the increasing of Chinese military power and coercive policy in the South, East, and Yellow China Sea, or the so-called China's Near-seas Region (CNR), have created regional security concern for the United States. The Chinese naval ability to carry out A2/AD operations in this area has eliminated the immunity of US warships that previously could operate freely without any significant threat. In order to confront the threat, the US government issued new policies, strategies and operational concepts where one of the most important elements of military force in charge of carrying it out was its sea power element in the form of surface warship stationed at the Yokosuka naval base. By using the concept of Sea Power and Maritime Warfare, this article concludes that in order to face the threats posed by China on CNR, US surface warships are expected to carry out strategies and operational concepts that are in line with two basic functions of sea power, sea control, and expedition operations albeit with a high risk in the event of war. This article uses a qualitative research method where data is collected through literature studies and interviews.

Keywords: CNR, A2 / AD, Sea Power, Yokosuka, Marine Control

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan fungsi kekuatan laut AS yang ditempatkan di Yokosuka Jepang dalam menghadapi kekuatan laut Tiongkok di China's Near-seas Region pada tahun 2013-2017. Dalam dua dekade terakhir, peningkatan kekuatan militer dan aktivitas koersif Tiongkok di LTS, LTT, dan Laut Kuning, dikenal juga dengan nama China's Near-seas Region (CNR), telah menciptakan kekhawatiran bagi Amerika Serikat. Kemampuan angkatan laut Tiongkok untuk melakukan operasi A2/AD diwilayah ini telah menghilangkan imunitas kapal-kapal perang AS yang sebelumnya dapat beroperasi secara bebas tanpa adanya ancaman berarti. Untuk menghadapi ancaman tersebut, militer AS mengeluarkan strategi maupun konsep operasional baru dimana salah satu unsur kekuatan militer paling utama yang bertugas menjalankannya adalah unsur kekuatan laut dalam wujud kapal-kapal perang permukaan yang ditempatkan di pangkalan angkatan laut Yokosuka, Jepang. Dengan menggunakan konsep Sea Power dan Maritime Warfare, artikel ini menyimpulkan bahwa guna menghadapi ancaman Tiongkok di CNR, kapal-kapal perang permukaan AS tersebut diharapkan dapat menjalankan srategi dan konsep operasional yang sesuai dengan fungsi dasar kekuatan laut yaitu pengendalian laut dan operasi ekspedisi meskipun dengan resiko yang tinggi jika terjadi perang.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana data dikumpulkan melalui studi literatur dan juga wawancara.

Kata Kunci: CNR, A2/AD, Kekuatan Laut, Yokosuka, Pengendalian Laut

Pendahuluan

Pada November 2011 Pemerintahan Barack Obama mengumumkan bahwa AS akan merubah fokus kebijakan luar negerinya dari sebelumnya Timur Tengah menjadi Asia-Pasifik, suatu kebijakan yang kemudian dikenal dengan nama Rebalancing Towards Asia dan terus menjadi fokus kebijakan luar negeri Obama hingga pemerintahannya berakhir di 2017. Tujuan dasar AS melalui kebijakan ini meningkatkan adalah untuk dan memperluas kerjasama antara AS dengan institusi-institusi negara-negara dan regional, memperkuat hubungan dengan negara sekutu, serta mengembangkan norma dan aturan regional yang sesuai dengan norma keamanan, ekonomi, dan politik internasional yang didukung AS, dalam dimensi keamanan, politik, ekonomi, diplomasi Brown. (Sutter, Adamson, 2013:1).

Salah satu hal yang melatarbelakangi munculnya kebijakan rebalancing adalah semakin kompleksnya isu keamanan diwilayah Asia-Pasifik khususnya dikawasan China's near-seas region (CNR). CNR merujuk pada wilayah laut yang terletak diantara daratan utama Tiongkok dan garis *first island chain* (FIC) yaitu Laut Tiongkok Selatan (LTS), Laut Tiongkok Timur (LTT), dan Laut Kuning 2017:1). Sebagian besar (CRS. keamanan di kawasan ini disebabkan oleh meningkatnya kekuatan militer aktivitas koersif Tiongkok di LTS dan LTT (CSIS, 2016:VI). Berkat pertumbuhan ekonominya yang pesat, dalam dua dekade Tiongkok terakhir terus melakukan modernisasi terhadap militernya mulai dari modernisasi alutsista, strategi tempur, komando/kecabangan, struktur hingga melakukan perubahan doktrin. Modernisasi ini secara signifikan meningkatkan kapabilitas militer Tiongkok dari yang sebelumnya (hanya mampu) terfokus pada pertahanan daratan utama (mainland) hingga wilayah lepas pantai Tiongkok, kini meluas hingga ke arah selatan seperti Samudra Hindia hingga Afrika, dan juga ke arah Timur seperti Laut Filipina.



Gambar 1. Kawasan China' Near Seas Region

(Sumber: RAND, 2011: Anti-Access Measures in Chinese Defense Strategy)

Di CNR, fokus modernisasi militer Tiongkok adalah peningkatan kapabilitas dalam operasi *counter-intervention* atau *anti-access/area denial* (A2/AD) yang bertujuan untuk mencegah, membatasi, atau mengganggu pergerakan kekuatan laut musuh disuatu wilayah dengan cara mengembangkan dan mengoperasikan persenjataan jarak jauh seperti rudal balistik dan rudal jelajah yang saat ini mampu menjangkau seluruh basis militer dan kapal perang AS yang beroperasi di wilayah Barat Pasifik (CRS, 2017:7-8). Fokus lainnya

yaitu melakukan perubahan doktrin (yang juga diikuti oleh peningkatan kapabilitas) angkatan laut Tiongkok, *People Liberation Army Navy*

(PLAN), dari sebelumnya *green* water navy yang terbatas pada wilayah perairan nasional menjadi blue water navy yang memiliki kemampuan untuk menggelar kekuatan di laut lepas, samudra, dan perairan antar benua jauh diluar wilayah kedaulatan negaranya.

Kekuatan laut AS di CNR diwakili oleh Armada Pasifik-nya, *US Pacific Fleet* (PACFLT), yang merupakan armada terbesar AS dengan kekuatan 200 kapal, 1.200 pesawat, dan 130.000 personil baik sipil maupun militer (CPF, 2017). Dari 11

pangkalan utama PACFLT di Asia-Pasifik, salah satunya adalah Pangkalan Angkatan Laut Yokosuka di Jepang. Memiliki nama Commander resmi Fleet Activities Yokosuka, pangkalan angkatan laut ini terletak di Teluk Tokyo, Yokosuka, Jepang. Peran sentral pangkalan Yokosuka bagi kekuatan laut AS di Asia-Pasifik diperlihatkan melalui kelengkapan fasilitas dan penempatan kekuatan disana yang menjadikannya sebagai pangkalan angkatan laut luar negeri terbesar AS di seluruh dunia (Naval Technology, 2017).

Yokosuka juga menjadi markas kekuatan utama Armada Pasifik AS, Armada Ke-7, yang memiliki kekuatan lengkap mulai dari kapal suplai dan logistik, kapal selam, kapal serbu amfibi, kapal perusak, kapal penjelajah, hingga kapal induk. Dari Yokosuka inilah kapal-kapal perang AS dan unsur kekuatan lainnya berpatroli di kawasan CNR guna melindungi kepentingan nasional AS dari ancaman yang ada, baik yang bersifat tradisional maupun non-tradisional.

Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa konsep. Pertama studi strategis untuk melihat bagaimana negara menggunakan aset militer untuk mencapai tujuan politik dalam sistem internasional serta bagaimana teknologi mempengaruhi strategi yang dapat diambil oleh negara. Kedua, konsep kekuatan laut (seapower) untuk melihat unsur dan fungsi kekuatan laut AS yang ada di Yokosuka. Unsur kekuatan laut yang diteliti terfokus pada unsur teknologi yaitu dalam bentuk kapal perang (termasuk peran dan sistem persenjataan yang melekat padanya). Sedangkan fungsi kekuatan laut yang akan

diteliti terdiri dari dua fungsi yaitu pengendalian laut dan operasi ekspedisi.

Terakhir adalah konsep peperangan laut yang digunakan untuk melihat aktivitas dan strategi kekuatan laut AS di Yokosuka serta kekuatan laut Tiongkok yang ada di CNR. Meskipun hingga saat ini tidak terjadi peperangan laut antara AS dengan Tiongkok, aktivitias dan strategi kekuatan laut kedua negara dibentuk atau diarahkan untuk menghadapi kemungkinan terburuk yaitu pecahnya peperangan laut. Nantinya aktivitas dan strategi kekuatan laut kedua kedua negara akan membantu peneliti dalam mendeskripsikan fungsi kekuatan laut AS di Yokosuka.

Unsur Kekuatan Laut AS di Yokosuka

AS sudah menempatkan kekuatan lautnya di Yokosuka sejak 1945 ketika menyerahkan pangkalan Jepang tersebut kepada AS. Seiring berjalannya waktu, postur kekuatan laut AS di Yokosuka, yang utamanya hadir dalam bentuk kapal perang permukaan, mengalami perubahan termasuk pada rentang waktu 2013-2017. Sesuai dengan kebijakan *rebalancing*-nya, dalam rentang waktu ini AS memperkuat postur kekuatannya di Yokosuka.

Pertama, peningkatan kekuatan hadir dalam bentuk penambahan kapal dimana satu kapal penjelajah dan satu kapal perusak ditambahkan ke Yokosuka. Kedua, peningkatan kekuatan hadir dalam bentuk pertukaran kapal dimana beberapa kapal sebelum tahun 2013 sudah ditempatkan di Yokosuka ditukar dengan kapal-kapal baru yang memiliki sistem persenjataan lebih modern. Melalui peningkatan kekuatan tersebut, kekuatan laut AS di Yokosuka berjumlah 1 kapal

induk, 1 kapal komando amfibi, 3 kapal penjelajah, dan 8 kapal perusak dimana setiap jenis kapal ini memiliki karakteristik dan fungsinya masing-masing (U.S. 7th Fleet, 2017:1).

Strategi kekuatan Laut AS di CNR

Strategi kekuatan laut AS dalam menghadapi Tiongkok di CNR dapat dilihat dari beberapa dokumen. Dokumen pertama yaitu *A Cooperative Strtegy for 21st Century Seapower* yang dirilis pada tahun 2015. Dokumen ini menjelaskan lima fungsi kekuatan laut AS yaitu;

- I. Akses Semua Wilayah (All Domain Access)
- II. Pencegahan (deterrence)
- III. Pengendalian Laut (Sea Control)
- IV. Proyeksi Kekuatan (*Power Projection*)
- V. Keamanan Maritim (*Maritime Security*)

Dalam dokumen ini juga disebutkan bahwa pada tahun 2020 sekitar 60% dari total kapal dan pesawat AL AS akan berada kawasan Indo-Asia-Pasifik, dimana Yokosuka dan CNR berada. Peningkatan kekuatan ini bertujuan agar AL AS memiliki kapasitas regional yang cukup guna menghadapi berbagai tantangan keamanan di kawasan.

Dokumen lainnya adalah The Asia-Pacific Maritime Security Strategy: Achieving U.S. National Security Objectives in a Changing Environment. Dokumen ini menjelaskan strategi kekuatan laut AS secara lebih spesifik yaitu strategi di kawasan Asia-Pasifik. Dalam dokumen ini, disebutkan bahwa modernisasi yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap kapabilitas militernya seperti kapal permukaan, pesawat, radar, dsb., ditunjukkan untuk menangkal intervensi militer AS di LTS dan LTT. Adapun salah satu cara AS untuk menghadapi Tiongkok adalah dengan memastikan berjalannya 'third offset'.

Third offset merupakan strategi AS untuk memastikan bahwa militernya, dalam hal ini angkatan lautnya, dapat mengimbangi dan tetap memiliki dominasi terhadap persenjataan musuh khususnya dengan memastikan bahwa dirinya sendiri unggul dalam hal teknologi persenjataan

Strategi lainnya adalah mengembangkan konsep operasional baru bernama Air-Sea Battle yang dirilis pada tahun 2010. Strategi ini dikembangkan secara khusus untuk menghadapi ancaman persenjataan strategi maupun Access/Area-Denial (A2/AD) yang salah satunya berasal dari Tiongkok dikawasan laut dekat. Anti-Access (A2) didefinisikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk menghambat pergerakan pasukan AS ke suatu kawasan. Sementara Area Denial (AD) didefinisikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk menggangu operasi pasukan AS di suatu kawasan. Kapabilitas menghambat pergerakan, ini akan memberikan resiko operasi lebih tinggi, pasukan memaksa AS untuk beroperasi lebih jauh dari kawasan yang diinginkan (U.S. DoD, 2013;2).

Dalam dokumen ini, tiga hal yang harus dilakukan oleh armada AS dalam menghadapi ancaman A2/AD yang tercantum dalam *Air-Sea Battle* adalah; (1) *Disrupt* yaitu menggangu kemampuan Komando, Kendali, Komunikasi, Komputer, Intelijen, Pengamatan, dan Pengintaian (*K4IPP*)musuh; (2) *Destroy* yaitu

menghancurkan atau menetralisir wahana (*platform*) dan sistem persenjataan A2/AD musuh dan; (3) *Defeat* yaitu mengatasi senjata yang sudah diluncurkan musuh (U.S. DOD, 2013;7).

Unsur Kekuatan Laut Tiongkok di CNR

Angkatan laut Tiongkok *People Liberation Army Navy* (PLAN) merupakan angkatan laut terbesar di Asia dimana hingga awal tahun 2017 memiliki lebih dari 300 kapal yang terdiri dari kapal kombatan, kapal pendukung, dan kapal selam (U.S. DoD, 2017:24). PLAN memiliki tiga armada yaitu armada utara, armada timur, dan armada selatan, dimana semua armada ini berada di dalam kawasan CNR. Oleh sebab itu, kekuatan laut Tiongkok di CNR adalah seluruh kekuatan AL-nya.

Strategi kekuatan Laut Tiongkok di CNR

Melalui dokumen berupa buku putih pertahanan yang dirilis pada tahun 2015 dengan judul *China's Military Strategy*, Tiongkok menjelaskan bahwa secara keseluruhan doktrin angkatan bersenjatanya adalah pertahanan aktif (*active defense*). Tiongkok menyatakan bahwa negaranya tidak akan melakukan serangan militer kecuali jika mereka sudah diserang terlebih dahulu dan mereka pasti akan menyerang balik jika diserang (Tao, 2015). Khusus mengenai angkatan lautnya, dokumen ini menjelaskan empat fungsi utama PLAN:

- I.Mengembangkan struktur kekuatan militer maritim modern
- II. Menjaga kedaulatan, hak-hak, serta kepentingan maritim
- III. Melindungi sea lines of communication (SLOCs)
- IV. Berpartisipasi dalam kerjasama maritim internasional

Strategi utama kekuatan laut Tiongkok di FIC adalah pertahanan laut dekat (Near Seas Defense/Jinhai Fangyu) yang merujuk pada pertahanan dilautan dekat Tiongkok yaitu LTS, LTT, dan Laut Kuning. Strategi ini menggantikan strategi pertahanan dekat pantai (near coast) dimana modernisasi PLAN dua dekade kebelakang memungkinkannya untuk



beroperasi dalam wilayah yang lebih luas. Strategi ini menuntut kemampuan untuk melaksanakan pendendalian laut (*sea control*) agar PLAN dapat menjalankan keempat fungsinya dengan penekanan utama yaitu melaksanakan penyeberangan laut dan pendaratan amfibi secara efektif dan bebas ke Taiwan (Li, 2011:117-118).

(FarSeas Gambar 2. Strategi Kekuatan Laut Tiongkok di FIC (Sumber: U.S. Department of Defense, Annual Report to Congress: Military and Security

Developments Involving the People's Republic of China 2010 (PDF)).

Pengendalian laut di laut dekat ini dilaksanakan dengan beberapa metode. Pertama, blokade dan isolasi (blockade and terhadap isolation) jalur pelayaran, pelabuhan, dan wilayah laut musuh guna mencegah kapal musuh beroperasi. Kedua, serangan gabungan (joint strike) terhadap peringatan dini, pengawasan, pengendalian, hingga logistic musuh guna melumpuhkan musuh. Ketiga, penekanan pulau-pulau terpencil (suppression of outlaying islands) untuk mencegah musuh menggunakan pulau-pulau tersebut. Keempat, pencarian dan pemusnahan (search annihilation) and menghancurkan kapal musuh yang berada diluar area blokade. Kelima, penghilangan rintangan secara menyeluruh (comprehensive barrier removal) guna menjamin kebebasan saat beroperasi (Li, 2011;119). Strategi Tiongkok di laut dekat ini juga dikenal dengan istilah counterintervention atau yang dinamai AS sebagai strategi anti-access/area denial (A2/AD).

Strategi kedua adalahpertahanan laut jauh defense/Yuanhai Fangwei) yang merujuk pada pertahanan laut selain CNR atau pertahanan laut yang melewati FIC. Wilayah laut yang masuk dalam strategi ini adalah laut yang terletak diantara FIC dan Second Island Chain (SIC) seperti Laut Filipina. FIC sendiri merupakan gugus kepulauan yang menghubungkan Jepang Utara, Kepulauan Mariana Utara, Guam, terus ke selatan hingga Pulau Biak di utara Papua. Strategi ini menuntut kemampuan untuk melaksanakan operasi ekspedisi/proyeksi kekuatan (*expeditionary* operations/power projection) secara berkelanjutan diluar CNR.

Nilai Strategis CNR

Bagi AS, nilai strategis kawasan CNR hadir sebagai konsekuensi dari berdirinya basis-basis militernya yang terletak atau bergantung pada kawasan ini. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, AS memiliki dominan pengaruh secara dengan menciptakan dikawasan CNR sistem aliansi dengan membentuk perjanjian dan atau membangun basis militer dengan tiga negara utama dikawasan yaitu Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan, yang kemudian beberapa tahun kebelakang terus memanjang ke arah selatan dengan dua negara yaitu Singapura dan Australia.

Semua basis militer diatas mengandalkan Freedom of Navigation dan SLOCs kawasan CNR untuk terhubung satu sama lain, lebih jauh lagi untuk menghubungkan kekuatan militer AS di Pasifik, USPACOM, dengan kekuatan militer AS di Timur Tengah dan Afrika, USAFRICOM dan USCENTCOM. Hilangnya kendali AS sebagai akibat dari kuatnya kendali semakin Tiongkok terhadap CNR akan berakibat pada terpecahnya kekuatan AS di Asia-Pasifik menjadi dua yaitu antara utara dan selatan CNR, serta mempersulit pergerakan militer AS baik dari Pasifik menuju Timur Tengah dan Afrika ataupun sebaliknya.

Nilai strategis CNR bagi AS selanjutnya juga terikat pada basis militer yang dimilikinya dikawasan. Ada tiga keuntungan yang didapatkan AS dengan memiliki basis militer luar negeri (RAND, 2013:XX). Pertama, contingency responsiveness dimana penempatkan pasukan dikawasn CNR memungkinkan AS

dapat merespon secara cepat ancaman terhadap kepentingan nasionalnya dibandingkan harus menunggu datangnya pasukan dari daratan utama AS yang tentunya akan memakan waktu lebih lama. Kedua, deterrence dan assurance dinama penempatan pasukan AS dinegara sekutu dapat mencegah musuh menyerang dengan meyakinkan musuh bahwa ia mendapatkan balasan yang cepat dan lebih besar jika berani melakukan serangan. Penempatan pasukan AS dinegara sekutu berguna iuga untuk menunjukkan komitmen negara pengirim kepada negara sekutu bahwa negara pengirim akan melindunginya. Ketiga, security cooperation dimana penempatan pasukan AS diluar negeri mampu meningkatkan kemampuan pasukan tersebut melalui proses adaptasi pasukan dengan lingkungan (asing) negara lain.

Bagi Tiongkok, kawasan CNR memiliki tiga nilai strategis yaitu sebagai barriers, springboards, dan bencmarks (Erickson dan Wuthnow, 2016:11). Sebagai barriers, CNR yang dibatasi oleh FIC dilihat sebagai penghalang yang dirancang oleh militer asing untuk menahan proyeksi kekuatan dan pertumbuhan angkatan laut Tiongkok. Hal ini dikarenakan adanya sistem berupa basis militer AS yang terbentang dari Jepang, Filipina, hingga Australia. Oleh sebab itu, jika Tiongkok, khususnya PLAN, ingin meningkatkan kapabilitasnya serta mendapatkan kebebasan dalam beroperasi dilaut, ia harus dapat menembus FIC.

Sebagai *springboards* atau batu loncatan, pulau-pulau di CNR yang didalamnya terdapat basis militer AS dilihat sebagai fasilitas untuk proyeksi kekuatan

militer asing terhadap daratan utama Tiongkok. Sebagai benchmarks atau tolak ukur, CNR dilihat sebagai tonggak untuk mendemonstrasikan perkembangan kemampuan proyeksi kekuatan Tiongkok sendiri. Kemampuan untuk beroperasi melewati FIC, utamanya dalam bentuk latihan militer, dilihat sebagai bukti proyeksi meningkatnya kapabilitas kekuatan PLAN. Pembangunan berbagai basis militer di Kepulauan Spratly dan Paracel seperti pangkalan udara, dermaga, hingga stasiun radar dan penempatan pesawat tempur, kapal, hingga rudal anti permukaan dan anti udara didalamnya juga berkontribusi pada kemampuan proyeksi kekuatan PLAN. Basis militer ini memungkinkan kapal-kapal PLAN untuk berlabuh, mengisi ulang logistik, serta dengan radar dan persenjataan yang ada memungkinkan Tiongkok untuk melakukan pengawasan seluruh wiliayah LTS.

Nilai Politis CNR

Kebijakan *rebalancing* penting bagi AS untuk meyakinkan kepada negaranegara dikawasan Asia-Pasifik bahwa AS tetap aktif secara global dan tidak kehabisan tenaga akibat Perang Afganistan dan Perang Irak serta AS tidak akan menarik diri dari suatu wilayah ketika berbagai isu keamanan meningkat. Khusus untuk negara-negara sekutu AS, strategi AS untuk menambah dan memodernisasi kekuatan militernya yang ditempatkan di CNR merupakan bentuk komitmen pemerintahan Obama terhadap sekutunya. Strategi ini juga menjawab kekhawatiran terhadap meningkatnya agresi Tiongkok dimata negara sekutu AS yang mengharapkan terus berlaniutnya kepemimpinan keterlibatan AS dalam menjaga perdamaian

dan kestabilan kawasan (U.S. DoD, 2015:19).

Di level domesik, kontrol terhadap CNR memainkan peran sentral dalam memastikan kelangsungan pertumbuhan ekonomi demi tercapainnya kemakmuran bagi negara dan warga masyarakatnya. Untuk mencapai hal tersebut, Tiongkok perlu melindungi hal-hal yang membuat pertumbuhan ekonominya terus terjadi vaitu, SLOCs, akses terhadap pasar, dan sumberdava alam. Sementara di level internasional. kawasan **FIC** akan memberikan panggung bagi Tiongkok untuk menunjukkan kebangkitan dirinya setidaknya sebagai regional power atau bahkan superpower kepada dunia internasional. Untuk memperlihatkan hal tersebut salah satu hal yang dilakukan Tiongkok adalah meningkatkan kapabilitas militernya, terutama PLAN, agar dapat menandingi negara lain, beroperasi jauh diluar wilayah nasional Tiongkok, serta menjalankan prinsip 'no compromise' dalam urusan kedaulatan dan territorial (Heath, 2017:1-5).

Nilai Ekonomis Kawasan FIC

Bagi kedua negara, nilai ekonomis utama CNR terletak pada SLOCs. Saat ini 80% volume dan 70% nilai perdagangan global mengandalkan transportasi laut dimana 60%-nya melewati kawasan Indo-Pasifik. LTS sendiri dilewati 1/3 pelayaran global dengan nilai sekitar 3,4 Triliun Dollar AS pada tahun 2016 (chinapower.csis.org, 2017) dan 1/3 pengiriman minyak mentah global serta lebih dari setengah pengiriman gas alam cair (LNG) global juga melewati wilayah ini (EIA, 2013). Pada tahun 2016, 64% perdagangan maritim Tiongkok berlayar melalui melewati wilayah ini dengan total nilai sebesar 1,470 triliun dolar AS. Sementara pada tahun yang sama, 14% perdagangan maritim AS berlayar melewati LTS dengan total nilai sebesar 208 miliar dolar AS. Sementara dalam sektor perikanan, tiap tahunnya wilayah ini mengasilkan 20 juta ton ikan yang merupakan 25% dari total tangkapan ikan dunia. Mengenai nilai sumber daya alam yang ada di LTS, diperkirakan terdapat 11 miliar barel minyak dan 190 triliun kaki kubik gas alam (EIA, 2013).

LTT memiliki potensi sumberdaya alam sebesar 200 juta barel minyak, 1 hingga 2 triluin kaki kubik gas alam. Dalam sektor perikanan, tiap tahunnya wilayah ini menghasilkan 3.8 juta ton ikan. LTT dan Laut Kuning memiliki nilai SLOCs yang penting khususnya bagi Tiongkok dimana enam dari sepuluh pelabuhan terbesarnya berada di wilayah ini dimana Laut Kuning sendiri mewakili sekitar 57% dari total volume perdagangan Tiongkok (CNA, 2012:4). Mengenai nilai sumber daya alam yang ada di Laut Kuning, diperkirakan terdapat 1.1 miliar barel minyak dan 2.2 triliun kaki kubik gas alam (U.S. GS, 2017: 1-2).

Sengketa Wilayah Di CNR

Sengketa wilayah yang terjadi dilatarbelakangi oleh nilai strategis, politis, dan ekonomis yang melekat pada CNR itu sendiri. Di LTS, terdapat tiga wilayah utama terjadinya sengketa wilayah yaitu Kepulauan Parasel, Karang Scarborough, dan Kepulauan Spratly. Di LTT, sengketa wilayah terjadi antara Tiongkok dan Jepang di Kepulauan Senkaku dimana meskipun AS bukan negara *claimant*, pakta pertahanan AS-Jepang memastikan bahwa

AS akan membantu Jepang menjaga kedaulatan wilayahnya.

Keagresifan pemerintah Tiongkok dalam melakukan klaim wilayah ini, yang terlihat dari beberapa insiden seperti tabrakan antar kapal penjaga laut, penangkapan nelayan, dan pengusiran kapal maupun pesawat oleh otoritas Tiongkok, meningkatkan rasa ketidakamanan bagi negara-negara dikawasan yang disisi lain juga meningkatkan keinginan negaranegara ini akan kehadiran AS yang kuat dikawasan (CSIS, 2016:14)

Militerisasi Di CNR

Di LTS, sejak tahun 2013 Tiongkok melakukan reklamasi dikepulauan Spratly dengan tujuan memperluas daratan pulaupulau yang ada untuk pembangunan lebih lanjut. Reklamasi ini kemudian diikuti dengan militerisasi dimana Tiongkok membangun fasilitas militer seperti landasan udara, pelabuhan, hanggar pesawat tempur, perkubuan senjata, barak tentara, serta fasilitas komunikasi dan pengawasan seperti stasiun radio dan radar. Meskipun reklamasi dan pembangunan dikepulauan ini tidak akan memperkuat klaim wilayah Tiongkok diwilayah LTS, Tiongkok dapat menggunakan pulau-pulau meningkatkan ini untuk mempertahankan kontrol serta pengawasan militernya diwilayah ini (U.S. DoD, 2017:9).

Di LTT, pada tahun 2013 Tiongkok secara sepihak mendirikan *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) yang hingga saat ini tidak diakui dan diprotes oleh AS dengan mengirim pesawat tempurnya untuk terbang diwilayah tersebut tanpa pemberitahuan kepada Tiongkok. Pendirian ADIZ ini dapat dilihat sebagai usaha

Tiongkok untuk meningkatkan klaim wilayahnya secara *de facto* di LTS yang pada akhirnya menggangu *status quo* wilayah LTS karena ADIZ ini tumpang tindih dengan ADIZ milik Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan yang sudah ada sebelumnya.

Dalam beberapa kesempatan, kapal perang AS yang berasal dari Yokosuka melakukan freedom of navigation operations (FONOPS) dengan berlayar didalam klaim 12 mil laut pulau-pulau buatan Tiongkok dikepulauan Spratly. FONOPS ini dilakukan sebagai bukti bahwa AS tidak mengakui klaim wilayah Tiongkok di LTS serta menegaskan bahwa kapal-kapal AS akan berlayar beroperasi diperairan manapun yang diizinkan sesuai dengan hukum internasional yang berlaku (CSIS, 2015:17). FONOPS ini tentunya mendapatkan protes dari Tiongkok yang menyebutkan bahwa kapal perang AS telah melakukan tindakan yang tidak professional dan merupakan bentuk provokasi militer yang mengancam keamanan Tiongkok.

Pengendalian Laut AS dan Ancaman PLAN

Dalam menjalankan fungsi pengendalian laut di CNR, kapal-kapal perang AS menghadapi ancaman dari PLAN yang memiliki strategi laut dekat dalam bentuk operasi A2/AD. Operasi ini tidak lain adalah bentuk pencegahan laut (sea denial) yang dilakukan PLAN khususnya terhadap AL AS di lautan sekitar Tiongkok dengan mengoperasikan sistemsistem persenjataan tertentu.

Ancaman pertama datang dari rudal balistik dan jelajah yang dapat dibawa oleh kapal selam ataupun kapal permukaan

Tiongkok. Kedua jenis rudal dapat digunakan untuk menyerang Yokosuka dan menghancurkan fasilitas militer seperti dermaga, dok perawatan, stasiun radio, hingga gudang logistik, serta menghancurkan kapal-kapal AS dipelabuhan sebelum dapat berlayar ke CNR. Rusaknya fasilitas perawatan dan perbaikan serta logistik ini menghambat pergerakan dan tempo operasi armada AS di CNR mengingat dengan rusaknya Yokosuka mengharuskan AS untuk memperbaiki kapal dan mengirimkan logistik dari basis militer lain yang lebih jauh seperti Guam, Singapura, atau bahkan Hawaii.

Kemudian, kemampuan pertahanan udara PLAN juga telah meningkat dengan pengoperasian berbagai rudal pertahanan udara, yang dapat menangkis serangan dari pesawat, helikopter, ataupun rudal yang diluncurkan oleh kapal perang AS. Rudalrudal ini memberikan kemampuan pertahanan udara mandiri dan berlapis bagi armada PLAN terlebih ketika ia harus beroperasi jauh diluar jangkauan pesawat udara yang berasal dari daratan utama.

Dalam dimensi bawah laut operasi A2/AD PLAN diwakili oleh kapal selam dan ranjau laut. Keunggulan utama kapal selam dibanding kapal permukaan adalah kemampuannya untuk beroperasi tanpa terdeteksi lawan berkat kemampuannya untuk bersembunyi hingga ke dasar lautan. Keunggulan ini akan digunakan oleh kapal selam PLAN untuk menerobos jaring patroli armada AS dan mendekat hingga jarak yang cukup untuk menyerang kapal perang AS dengan torpedo ataupun rudal jelajah yang dibawanya.

Tiongkok juga memiliki berbagai tipe ranjau laut modern yang dapat diletakkan diberbagai jalur laut untuk mencegah kapal-kapal AS mendekati CNR serta perairan sekitar Yokosuka untuk mencegah kapal-kapal AS dapat keluar dari pelabuhan. Peletakkan ranjau cukuplah mudah dan dapat dilakukan secara rahasia dengan menggunakan kapal selam PLAN sementara operasi pembersihan ranjau yang harus dilakukan oleh AS akan menjadi operasi yang rumit dan memakan banyak waktu (Speller, 2015:99).

Ancaman lainnya juga datang dari kapal patroli berpeluru kendali Tiongkok seperti korvet. Memang kapal-kapal ini memiliki ukuran yang lebih kecil, minim pertahanan udara, serta tidak dapat beroperasi secara optimal di laut lepas. Namun puluhan kapal ini dapat melakukan serangan bersama (*swarms attack*) terhadap armada AS yang beroperasi didalam CNR dengan menggunakan taktik *hit and run*.

Terakhir, ancaman terhadap pengendalian laut AS berasal dari kapal perang permukaan PLAN. Untuk ancaman dari sistem persenjataan yang dibawa oleh kapal-kapal ini, seperti rudal, torpedo, dan ranjau, kurang lebih sudah dijelaskan dalam paragraf-paragraf sebelumnya. Sementara ancaman lain berasal dari sensor yang ada dalam kapal, seperti radar, sonar, dan perangkat sistem komunikasi, yang menjadi fondasi bagi kemampuan K4IPP. digunakan Kemampuan untuk ini mendeteksi dan apabila perlu melakukan penargetan senjata kepada kapal perang AS dari jarak jauh.

Pengendalian Laut AS di CNR

Dalam dokumen *Naval Operations Concept 2010* dan CS-21R, disebutkan

bahwa pengendalian laut merupakan faktor penting sebagai fondasi bagi kekuatan laut AS. Oleh karenanya, kekuatan laut AS diharuskan untuk dapat mengatasi segala hal yang mengancam kemampuannya untuk mengendalikan laut. Menghadapi ancaman yang diberikan oleh Tiongok, fungsi pengendalian laut yang dijalankan oleh kapal-kapal perang AS di Yokosuka dijalankan dalam lima bentuk operasi yaitu anti-surface warfare (ASUW), antisubmarine warfare (ASW), mine warfare (MIW), anti-air warfare (AAW) dan serangan terhadap peluncur rudal pantai (shore-based missile launchers) atau disebut juga Strike Warfare (STW) (Clark, 2015;3).

Setiap kapal perang AS di Yokosuka dapat berkontribusi dalam lima operasi ini, berkat persenjataan maupun teknologi yang melekat padanya, baik secara independen ataupun berkelompok, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Fungsi Pengendalian Laut AS di CNR

Fungsi Pengendalian Laut dalam Menghadapi Tiongkok						
Anti-surface Warfare (ASUW)						
Kapal Induk	 Memperluas area deteksi, penargetan, dan penyerangan terhadap target permukaan Menyerang target permukaan dengan pesawat 					
Kapal Komando Amfibi	Melakukan fungsi K4IPP					

Kapal	Menyerang target					
Penjelajah &	permukaan dengan					
Perusak	rudal dan meriam					
Anti-Submarine Warfare (ASW)						
Melakukan						
	pemburuan kapal					
Kapal Induk	selam secara					
	terbatas.					
Kapal						
Komando	Melakukan fungsi					
Amfibi	K4IPP					
THIIIOI	 Kapal utama dalam 					
	pemburuan kapal					
Kapal	selam.					
Penjelajah &	Menciptakan jaring					
Perusak	anti-kapal selam					
reiusak	disekeliling Armada					
	AS.					
Mina						
Mine	Warfare (MIW) • Melakukan					
Kapal Induk						
	pemburuan ranjau					
** 1	secara terbatas					
Kapal	 Melakukan fungsi 					
Komando	K4IPP					
Amfibi						
	 Kapal utama dalam 					
Kapal	pemburuan ranjau					
Penjelajah &	 Membersihkan jalur 					
Perusak	pelayaran Armada					
	AS dari ancaman					
	ranjau					
Anti-A	ir Warfare (AAW)					
	Memperluas area					
	deteksi, penargetan,					
Kapal Induk	dan penyerangan					
	terhadap target di					
	udara					
	Memberikan					
	superioritas udara					
	terhadap pesawat dan					
	helikopter musuh					

Verity - UPH Journal of International Relations Faculty of Social and Political Science Pelita Harapan University

	■ Memberikan		
	peringatan dini		
	terhadap ancaman di		
	udara		
Kapal	 Melakukan fungsi 		
Komando	K4IPP		
Amfibi	K4IFF		
	Kapal utama dalam		
	pertahanan udara		
Kapal	berlapis terutama		
Penjelajah &	dalam menghadapi		
Perusak	rudal balistik dan		
	jelajah		
Strike	Warfare (STW)		
	Memperluas area		
	deteksi, penargetan,		
	dan penyerangan		
Vanal Indula	terhadap target di		
Kapal Induk	darat		
	 Menyerang target di 		
	darat dengan pesawat		
	dan helikopter		
Kapal	•		
Komando	 Melakukan fungsi 		
Amfibi	K4IPP		
Kapal	 Menyerang target di 		
Penjelajah &	darat dengan rudal		
Perusak	dan meriam		

(Sumber: Olahan Peneliti, 2018)

Operasi Ekspedisi AS di CNR

Di CNR, pendaratan amfibi bukan menjadi tugas utama kapal-kapal AS di Yokosuka, melainkan menjadi tugas gugus tugas amfibi yaitu *Amphibious Ready Group* yang juga berkedudukan ditempat lain salah satunya di Sasesbo, Jepang. Gugus tugas amfibi ini memiliki tugas untuk mengangkut dan mendaratkan pasukan marinir AS. Sementara tugas kapal-kapal AS di Yokosuka dalam operasi ekspedisi adalah sebagai berikut

Tabel 2. Fungsi Operasi Ekspedisi AS di CNR

Fungsi Operasi Ekspedisi dalam Menghadapi Tiongkok					
Strike Warfare (STW)					
Kapal Induk	 Memperluas area deteksi, penargetan, dan penyerangan terhadap target di darat Menyerang target di darat dengan pesawat dan helikopter 				
Kapal Komando Amfibi	Melakukan fungsi K4IPP				
Kapal Penjelajah & Perusak	 Menyerang target di darat dengan rudal dan meriam 				
Pengawalar	Gugus Tugas Amfibi				
Kapal Induk	 Menjalankan lima operasi yang sama dengan lima operasi dalam fungsi pengendalian laut 				
Kapal Komando Amfibi	 Menjalankan lima operasi yang sama dengan lima operasi dalam fungsi pengendalian laut 				
Kapal Penjelajah & Perusak	 Menjalankan lima operasi yang sama dengan lima operasi dalam fungsi pengendalian laut 				
Bantuan Tembakan dalam Pendaratan Amfibi					
Kapal Induk	Memberikan bantuan tembakan dari udara dengan				

Verity - UPH Journal of International Relations Faculty of Social and Political Science Pelita Harapan University

	pesawat dan helikopter sesuai permintaan pasukan pendarat
Kapal Komando Amfibi	Melakukan fungsi K4IPP
Kapal Penjelajah & Perusak	 Memberikan bantuan tembakan dari permukaan dengan rudal dan meriam sesuai permintaan pasukan pendarat

(Sumber: U.S. Navy: Our Ships, 2018)

Skenario Perang Laut AS-Tiongkok di CNR

Perlu di garis bawahi bahwa dalam bagian ini peneliti hanya bertujuan untuk mendeskripsikan secara singkat fungsi kekuatan laut AS yang ada di Yokosuka saat terjadi perang laut antara kedua negara.

Peperangan laut antara kedua negara dapat terjadi di dua wilayah yaitu Taiwan dan LTS. Dalam skenario Taiwan, Tiongkok dapat melakukan tindakan koersif terhadap Taiwan dalam beberapa bentuk seperti blokade laut, pengeboman, hingga invasi dengan cara melakukan operasi amfibi di Teluk Taiwan. Sementara dalam skenario LTS, perang bisa terjadi ketika Tiongkok

terus melakukan reklamasi dan pembangunan basis militer dipulau-pulau buatan, menempatkan secara permanen armada kapalnya, atau secara sepihak menutup jalur laut dan udara.

Dalam kedua skenario, PLAN akan berhadapan dengan AS yang akan melakukan intervensi dan memberikan bantuan misalnya kepada Taiwan. Seperti yang sudah dijelaskan dibab sebelumnya, PLAN akan melakukan operasi A2/AD di LTT untuk memblokade armada AS yang datang dari Utara dan Timur seperti Jepang dan Guam, serta di LTS untuk memblokade armada AS yang datang dari arah Asia Tenggara.

Dengan kecepatan penuh, Armada AS dapat mencapai Taiwan dan LCS dalam waktu kurang dari dua hari. Iniliah keuntungan AS yang memiliki basis militer serta menempatkan kapal perangnya di Yokosuka bahwa secara cepat AS dapat merespon terjadinya eskalasi dengan Tiongkok dibandingkan harus menunggu armadanya tiba dari wilayah atau basis militer lain.

Perkembangan jangkauan persenjataan armada Tiongkok akan memaksa Armada AS untuk menjaga jarak dengan tidak masuk atau melewati Selat Taiwan namun tetap berada pada jarak yang

	Straight-line distance to Taiwan Strait areaa	Minimum travel time in days, based on average speeds belowb		
Port	(nautical miles)	20 knots	25 knots	30 knots
Yokosuka, Japanc	1,076	2.2	1.8	1.5
Guam	1,336	2.8	2.2	1.9
Singapored	1,794	3.7	3.0	2.5
Pearl Harbore	4,283	8.9	7.1	5.9
Everett, WA	5,223	10.9	8.7	7.3
San Diego	5,933	12.3	9.9	8.2

Gambar 3. Waktu & Jarak Tempuh Kapal Perang AS dalam Mencapai Selat Taiwan

(Sumber: Jerald D, 2007: FinnChina-U.S. Economic and Geopolitical Relations)

cukup untuk meluncurkan senjata dan pesawat dalam jumlah besar (RAND 2015; 215). Hal ini juga berkaitan dengan keuntungan yang dimiliki oleh kapal induk dibandingkan dengan pangkalan udara yang di darat. Meskipun dilengkapi pertahanan udara, pangkalan udara AS yang ada di CNR tetap rentan terhadap serangan PLAN karena sifatnya yang tetap (fixed). Akan jauh lebih sulit bagi PLAN untuk menyerang kapal induk AS yang memiliki mobilitas tinggi dimana dengan kecepatan 25 knot dalam waktu 24 jam ia dapat berpindah-pindah tempat sejauh 600 mil laut (Beng, 2016:75).

Disisi lain, lebih amannya Armada AS untuk beroperasi diluar CNR juga disebabkan oleh adanya kecenderungan bahwa jika peperangan terjadi, PLAN akan memilih untuk hanya beroperasi di dalam CNR. Hal ini dikarenakan masih belum kemampuan sempurnanya blue-water PLAN. Di Pasifik Tiongkok tidak memiliki basis militer diluar CNR sehingga jika armadanya beroperasi diluar CNR, kapalkapalnya harus mengandalkan logistik, yang tidak memiliki kemampuan pertahanan sehingga sangat rentan terhadap serangan AS, ataupun harus kembali ke daratan utama jika ingin melakukan perbaikan atau pengisian ulang senjata. Dari sisi strategi, operasi diluar CNR bukanlah prrioritas Tiongkok, setidaknya untuk saat ini. Strategi laut dekat memiliki prioritas lebih tinggi sehingga kapal-kapal PLAN dikerahkan untuk operasi lokal dan ada dalam posisi bertahan didalam CNR (CNAS, 2017;20).

Sementara bagi AS, meskipun PLAN memiliki keuntungan di dalam CNR, Armada AS dapat menggunakan strategi A2/AD yang sama terhadap armada Tiongkok. Armada AS dapat menutup semua jalur laut menuju CNR, mengurung dan memberikan ancaman serupa bagi armada Tiongkok yang berusaha untuk keluar dari CNR, dan pada akhirnya menutup kekuatan laut Tiongkok dari dunia. Jika PLAN menghalangi AS masuk ke laut dekat, AS akan menghalangi PLAN keluar dari laut dekat, sebuah situasi yang bernama *mutual assured access denial* (Malufti, Wawancara 1).

Dampak Strategis Perang Laut AS-Tiongkok di CNR

Dalam situasi perang keputusan AS untuk mengirimkan atau tidak Armada AS kedalam CNR akan bergantung pada pertimbangan seberapa besar kerugian yang rela ditanggung oleh AS demi melakukan pengendalian laut dan operasi ekspedisi terhadap Tiongkok. Kekuatan laut yang dimiliki Tiongkok pada tahun 2013-2017 secara nyata dapat menyebabkan kerusakan besar terhadap Armada AS di dalam CNR. Namun pada akhirnya ketika masih ada perdamaian kerugian-kerugian ini hanya diprediksi terlebih ketika kedua negara terus mengembangkan dan memodernisasi kekuatan lautnya masing-masing (Malufti, Wawancara 1).

Salah satu dampak strategis yaitu kerugian angkatan laut kedua negara baik dalam hal materil maupun personil. Bagi Armada AS, jika ia beroperasi semakin dekat dengan daratan utama Tiongkok, semakin tinggi pula potensi kerusakan yang

dapat diterimanya. Sebaliknya bagi PLAN semakin jauh armadanya beroperasi dari daratan utama atau melewati CNR, semakin tinggi potensi kerusakan yang dapat diberikan Armada AS kepadanya.

Dampak strategis lainnya adalah AS terpaksa menarik mundur pasukan dan merelokasi basis militernya, sebelumnya ada di CNR seperti Filipina, Jepang, dan Korea Selatan, menjauh dari FIC kearah SIC seperti Guam. Hal ini dapat terjadi ketika AS gagal mengimbangi perkembangan militer Tiongkok dan atau tidak berhasil menahan laju armada PLAN, dalam seknario Taiwan, LTS, ataupun skenario peperangan lainnya, akibat AS lebih memilih untuk menahan dihadapan potensi kerusakan tinggi yang dapat diterima oleh Armada AS jika mengintervensi Tiongkok. Jika hal ini terjadi, kredibilitas kehadiran militer AS di CNR akan turun drastis dan dapat menvebabkan negara-negara vang sebelumnya menyetujui berdirinya basis militer AS di wilayah nasionalnya mencabut izin tersebut untuk mengurangi ketegangan negaranya sendiri dengan Tiongkok (Holmes, 2010:125).

Kesimpulan

Peningkatan kekuatan militer dan aktivitas koersif Tiongkok di CNR selama

dua dekade terakhir telah menghilangkan imunitas kapal-kapal perang AS sebelumnya Yokosuka vang beroperasi secara bebas di kawasan tersebut tanpa adanya ancaman berarti. Seperti skenario perang yang sudah dijelaskan sebelumnya, kini kapabilitas dan strategi A2/AD PLAN membuatnya beroperasi dan menjangkau seluruh wilayah CNR sehingga, jika terjadi perang, armada AS akan menghadapi risiko yang tinggi jika 'nekat' beroperasi di dalam CNR.

Kondisi inilah yang kemudian menjadi dasar bagi AS untuk menyusun kebijakan, strategi, dan konsep operasional baru yang disusun berdasarkan bentuk ancaman yang diberikan oleh PLAN dan skenario peperangan yang mungkin terjadi antara kedua negara di CNR.

Sesuai dengan konsep studi strategis, kecanggihan dan kapabilitas kapal-kapal perang permukaan AS di Yokosuka memungkinkan AS untuk menjalankan kebijakan, strategi, dan konsep operasional barunya sesuai dengan dua fungsi dasar kekuatan laut yaitu pengendalian laut dan operasi ekspedisi.

Daftar Pustaka

- Beng, B. (2016). The combat utility of the U.S. fleet aircraft carrier in the post-war period. *Journal of Military and Strategic Studies*, 16(4), 67-105. Retrieved from http://jmss.org/jmss/index.php/jmss/article/view/640/pdf
- Center for Strategic and International Studies. (2016). *Asia-Pacific rebalance 2025: Capabilities, presence, and partnership.* Retrieved from https://www.csis.org/analysis/asia-pacific-rebalance-2025
- Center for Strategic and International Studies. (2017). How much trade transits the South China Sea? *ChinaPower Project*. Retrieved from https://chinapower.csis.org/much-trade-transits-south-china-sea/
- Clark, B. (2015). The role of surface forces in presence, deterrence, and warfighting. *Center for Strategic and Budgetary Assessments*. Retrieved from https://csbaonline.org/research/publications/the-role-of-surface-forces-in-presence-deterrence-and-warfighting
- CNA. (2012). The Long Littoral Project: East China and Yellow Seas. *CNA*. Retrieved from https://www.cna.org/CNA files/PDF/IOP-2012-U-002207-Final.pdf
- Commander U.S. Pacific Fleet. (2017). About. Retrieved from http://www.cpf.navy.mil/about/
- Cordesman, A. H., & Colley, S. (2015). Chinese strategy and military modernization in 2015: A comparative analysis. *Center for Strategic and International Studies*. Retrieved from http://csis.org/files/publication/150901_Chinese_Mil_Bal.pdf
- Cronin, P. M., Rapp-Hooper, M., Krejsa, H., Sullivan, A., & Doshi, R. (2017). Beyond the San Hai: The challenge of China's blue-water navy. *Center for a New American Security*. Retrieved from https://www.cnas.org/publications/reports/beyond-the-san-hai
- Erickson, A., & Wuthnow, J. (2016). Barriers, springboards and benchmarks: China conceptualizes the Pacific "island chains". *The China Quarterly*, 225, 1-22. https://doi.org/10.1017/S0305741016000011
- Heath, T. R. (2018). *Chinese political and military thinking regarding Taiwan and East and South China Seas*. Santa Monica, CA: RAND Corporation. Retrieved from https://blogs.shu.edu/diplomacy/files/2012/05/009_Holmes_Layout-1a.pdf
- Holmes, J. (2010). A "fortress fleet" for China. *The Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations*, 125. Retrieved from https://blogs.shu.edu/diplomacy/files/2012/05/009 Holmes Layout-1a.pdf
- Holmes, J. R. (2018, 22 May). [Interview with U. S. Naval War College professor by Muhammad Fauzan Maluft].
- Li, N. (2011). The evolution of China's naval strategy and capabilities: From "Near Coast" and "Near Seas" to "Far Seas". In P. Saunders (Ed.), *The Chinese Navy expanding capabilities, evolving roles* (pp. 117-130). Washington DC: National Defense University Press. Retrieved from http://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/Books/chinese-navy.pdf
- Lostumbo, M. J., McNerney, M. J., Peltz, E., Eaton, D., Frelinger, D. R., Greenfield, V. A., Halliday, J., Mills, P., Nardulli, B. R., Pettyjohn, S. L., Sollinger, J. M., & Worman, S. M. (2013). Overseas basing of U.S. Military Forces: An assessment of relative costs and

- strategic benefits. Sant Monica, CA: RAND. Retrieved from https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR201.html
- Naval Technology (2017). Commander fleet activities. *Naval Technology*. Retrieved from http://www.naval-technology.com/projects/commanderfa/
- O'Rourke, R. (2017). China naval modernization: Implications for U.S. Navy capabilities—background and issues for congress. *Congressional Research Service*. Retrieved from https://fas.org/sgp/crs/row/RL33153.pdf
- Speller, I. (2014). *Understanding naval warfare*. New York, NY: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315882260
- Sutter, R., Brown, M., & Adamson, T. (2013). *Balancing acts: The U.S. rebalance and Asia-Pacific stability*. Washington, DC: Sigur Center for Asian Studies. Retrieved from https://www2.gwu.edu/~sigur/assets/docs/BalancingActs Compiled1.pdf
- Tao, Z. (2015). *Full text: China's military strategy*. Retrieved from http://eng.mod.gov.cn/Press/2015-05/26/content_4586805.htm
- Till, G. (2009). *Seapower: A guide for the twenty-first century* (2nd ed.). London, UK: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203880487
- U.S. 7th Fleet. (2017). *The United States seventh fleet*. Retrieved from http://www.c7f.navy.mil/Portals/8/documents/7thFleetTwoPagerFactsheet.pdf?ver=2 017-09-20-040335-22
- U.S. Department of Defense. (2013). *Air-Sea battle: Service collaboration to address anti-access & area denial challenges*. Retrieved from https://archive.defense.gov/pubs/ASB-ConceptImplementation-Summary-May-2013.pdf
- U.S. Department of Defense. (2017). *Annual report to Congress: Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2017*. Retrieved from https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2017_China_Military_Power_Report.PDF.
- U.S. Department of the Navy. (2010). *Naval operations concept*. Retrieved from https://fas.org/irp/doddir/navy/noc2010.pdf
- U.S. Department of the Navy. (2015). A cooperative strategy for 21st century seapower. *United States Department of the Navy*. Retrieved from https://www.navy.mil/local/maritime/150227-CS21R-Final.pdf
- U.S. Energy Information Administration. (2013). South China Sea. *EIA.gov*. Retrieved from https://www.eia.gov/beta/international/regions-topics.php?RegionTopicID=SCS U.S. Geological Survey. (2017). Assessment of undiscovered conventional oil and gas resources in the West Korea Bay–North yellow sea basin, North Korea and China, 2017. *U.S. Geological Survey*. Retrieved from https://pubs.usgs.gov/fs/2017/3041/fs20173041.pdf
- U.S. Navy. (2018). Our ships. Retrieved from https://www.navy.mil/navydata/our_ships.asp